

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara berkembang di dunia, industri di segala sisi kehidupan berfokus dalam pertumbuhan ekonomi yang layak. Suatu hal di dalam kegiatan perekonomian yang dapat membantu menopang perekonomian Indonesia dan mampu melakukan penyesuaian dalam hal adanya pergeseran perekonomian yang terjadi yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM ini diusahakan oleh pemerintah secara serius guna memperoleh fasilitas dengan dipersiapkannya legalitas menurut undang undang nomer 20 tahun 2008 terkait pembiayaan usaha mikro kecil menengah, selain itu pemerintah juga telah memberikan upaya pelatihan dan sosialisasi guna memberikan kemudahan dalam adanya pemasukan dana investasi dan pengelolaannya (Masruroh dkk., 2021). UMKM memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan solusi dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat memberikan solusi dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia (Biduri dkk., 2021).

UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan, berdasarkan data yang didukung oleh kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (Kemenkop sUMKM) dalam tahun 2022 UMKM di Indonesia tercatat mencapai 8,71 juta unit. Jumlah UMKM tertinggi di tahun 2022 diperoleh Provinsi Jawa Barat dengan mencapai 1,49 juta unit usaha, sedangkan untuk jumlah UMKM yang terendah tahun 2022 diperoleh provinsi Papua Tengah dengan mencapai 3,9 ribu unit usaha. Provinsi Jawa Timur itu sendiri memperoleh peringkat ke 3 yakni dengan mencapai 1,15 juta unit usaha. Selain itu berdasarkan data kementerian

keuangan, UMKM telah sukses mendonasikan 90% dari kegiatan usaha serta lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia (Putri, 2023).

Berdasarkan data dari Kemenkop telah memberikan gambaran terkait UMKM dalam membantu perekonomian Indonesia. Provinsi Jawa timur khususnya madura yang memiliki berbagai UMKM salah satunya dibidang batik (Ghozali *dkk.*, 2017) . Berdasarkan pengakuan UNESCO tanggal 2 Oktober 2009 ditetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia dan disambut baik oleh pemerintah dengan mengeluarkan keputusan presiden pada tanggal 17 November 2009 nomor 33 tahun 2009 tentang hari batik nasional (Yudi Aprianingrum & Hayati Nufus, 2021). Berdasarkan data UMKM di Kabupaten Sumenep yang diperoleh dari dinas koperasi dan usaha mikro sebesar 3.529 (R. N. Sari & Alwiyah, 2020). Sedangkan untuk Kabupaten Bangkalan tahun 2021 memiliki pengusaha batik sebanyak kurang lebih 100 orang sedangkan pengrajin sebanyak 800 orang (Hoiriyah & Kurniasari, 2022). Banyak UMKM yang menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha (Simanjuntak et al., 2020).

Permasalahan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan usaha yakni perihal pencatatan dan pelaporan keuangan yang berhubungan erat dengan akuntansi, banyaknya UMKM yang belum mengaplikasikan informasi keuangan pada usahanya dan belum menerapkan pencatatan akuntansi karena minimnya pengetahuan serta adanya tanggapan mempersulit pekerjaan (Simanjuntak *dkk.*, 2020). Tahun 2009 DSAK IAI menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum berbasis IFRS dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi pada laporan keuangan. SAK ETAP ini berlaku efektif pada 1 januari 2011 (Lubis, 2020).

UMKM mengalami penurunan secara drastic dikarenakan UMKM belum menerapkan SAK ETAP, pandangan UMKM dalam hal ini sulit dan rumit serta kurangnya peran pemerintah dalam hal pemberian sosialisasi di UMKM (Lubis, 2020). Banyak UMKM yang berasumsi pelaporan keuangan tidak penting sehingga dapat meremehkan cara pengungkapan laporan keuangan usaha dan jika diterapkan akan tidak disiplin dalam melakukan pelaporan tiap bulannya (Mardi, 2019).

Selain itu terdapat tanggapan UMKM belum memerlukan pencatatan akuntansi karena pemilik usaha tidak mempunyai ekspektasi yang lebih terhadap usahanya, dan pemikiran pemilik UMKM hanya mengandalkan keuntungan saja tanpa memikirkan dampak jangka panjang dan pendek dalam pengembangan usahanya (Lubis, 2020). Dengan adanya hal itu terdapat bukti nyata yang diberikan selain SAK ETAP oleh pemerintah sebagai dukungan kepada UMKM yaitu dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) disusun berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2018 dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dan memudahkan UMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan (Wulandari & Arza, 2022). Pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM lebih mudah dibandingkan dengan SAK ETAP (Mutiah, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu para UMKM belum melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM dikarenakan belum memahami dan tidak mempunyai karyawan di bagian keuangan (Nabila & Khoiriawati, 2023). Fenomena yang menarik yakni meskipun para UMKM belum menerapkan pencatatan akuntansi sama sekali dan tidak berdasarkan SAK EMKM tetapi usaha yang dijalankan tetap berkembang (Putra dkk., 2023). Penelitian Hikmahwati &

Irwansyah (2022), Wulandari & Arza (2022), Janrosi (2018), Kusuma & Lutfiany (2018), Simanjuntak *dkk.* (2020), Nabila & Khoiriawati (2023), Nuvitasari *dkk.* (2019), dan Mutiah (2019) menyimpulkan bahwa pelaku UMKM belum menerapkan SAK EMKM dan hanya melakukan pencatatan akuntansi sederhana dikarenakan pandangan para UMKM pencatatan akuntansi sangat rumit dan adanya tanggapan mempersulit pekerjaan, serta dikarenakan kurangnya tenaga akuntansi.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait pelaku UMKM belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan pencatatan akuntansi yang masih dianggap sulit, terdapat fenomena menarik yakni meskipun para UMKM menerapkan pencatatan akuntansi secara sederhana dan tidak berdasarkan SAK EMKM tetapi usaha yang dijalankan tetap berkembang. Hal ini diungkapkan oleh Simanjuntak *dkk.* (2020), UMKM belum mengimplementasikan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM hanya melakukan pencatatan sederhana yakni pencatatan pembelian bahan baku dan pendapatan usaha. Berdasarkan penelitian Hikmahwati & Irwansyah (2022) terdapat 80% UMKM belum memahami akuntansi, 51% belum melakukan pencatatan akuntansi secara lengkap, 100% UMKM melakukan pencatatan Akuntansi secara manual, 70% pelaku UMKM tidak melakukan pembuatan laporan keuangan, alasan UMKM tidak membuat pencatatan akuntansi dikarenakan tidak memahami dan sulit dalam menerapkannya. UMKM yang berada di Madura menerapkan pencatatan akuntansi yang secara sederhana.

Madura mempunyai banyak UMKM khususnya dibidang batik yang masih menerapkan pencatatan akuntansi secara sederhana bahkan ada yang tidak menerapkan pencatatan akuntansi tetapi usaha tersebut terus berkembang pesat, penelitian ini mengangkat objek penelitian UMKM dibidang batik yang memiliki

nama *Jokotole Collection* di Kabupaten Bangkalan. Alasan penelitian ini mengambil objek ini dikarenakan pemilik UMKM merupakan seorang akademisi dan wirausaha. UMKM ini telah terpilih sebagai Wirausaha Binaan Bank Indoensia (WUBI), serta UMKM ini memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Produk Batik yang dihasilkan oleh UMKM *Jokotole Collection* telah dikenal hingga mancanegara yakni di Jepang, Malaysia, dan China.

Terdapat pula objek penelitian selain UMKM *Jokotole Collection* yakni Sentra Batik Al-Barokah di Kabupaten Sumenep yang merupakan seorang praktisi dan wirausaha dengan mengandalkan bakat desain serta faktor lingkungan mayoritas seorang pengrajin batik. Selain dari itu kedua objek ini juga mempunyai hubungan kerja sama yakni Sentra Batik Al-Barokah membagi ilmu kepada UMKM *Jokotole Collection* yang dapat dikatakan Sentra Batik Al-Barokah ini memiliki pengalaman lebih dahulu dibandingkan dengan *joktotole Collection*.

Setiap organisasi maupun individu mempunyai makna terkait akuntansi dan laporan keuangan yang berbeda-beda, penelitian Rohmatunnisa (2021) mengungkapkan para pengusaha etnis tionghoa yang mengartikan makna akuntansi di dalam diagram lingkaran yakni perhitungan, tanggung jawab, dan informasi. Sedangkan penelitian Zulkifli (2022) mengungkapkan para petani sudah sadar akan pentingnya praktik akuntansi dalam menentukan untung rugi kegiatan usaha, tetapi para petani mendapatkan kesulitan dalam menerapkan laporan keuangan sehingga tidak mengetahui keuntungan selama periode tanam. Selain itu terdapat penelitian Hidayat & Auliyah (2020) mengungkapkan terdapat makna yang berbeda dalam pengelolaan keuangan bidik misi, dengan memaknai pengelolaan keuangan bidikmisi sebagai skala prioritas yang mendahulukan kebutuhan penting sehingga dengan mudah melakukan pengelolaan keuangan

sedangkan terdapat yang memaknai dengan menggunakan *feeling* dan kerja sama dapat diartikan *feeling* lebih kuat dari logika sehingga tidak membuat laporan keuangan yang berakhir penyesalan.

Berdasarkan penjabaran di atas menyebabkan adanya penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengkaji komparasi pemaknaan pencatatan akuntansi dari sisi “Akademisi” UMKM Batik Jokotole *Collection* dan “Praktisi” Sentra Batik Al Barokah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahannya yang akan diambil dalam penelitian ini yakni bagaimana komparasi pemaknaan pencatatan akuntansi dari sisi “Akademisi” UMKM Batik Jokotole *Collection* dan “Praktisi” Sentra Batik Al Barokah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengkaji komparasi pemaknaan pencatatan akuntansi dari sisi “Akademisi” UMKM Batik Jokotole *Collection* dan “Praktisi” Sentra Batik Al Barokah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman, pemikiran, dan pengembangan ilmu mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan pihak UMKM yang memiliki pandangan kriteria yang berbeda.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi yang bermanfaat untuk penelitian mendatang dengan pembahasan yang sejalan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan lebih luas lagi terkait pemaknaan pencatatan akuntansi UMKM baik dari bidang yang berbeda.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu menambahkan evaluasi terkait penyusunan laporan keuangan terutama bagi pihak UMKM, serta dapat mendukung dalam hal pemberian dana bagi UMKM yang baru menjalankan usahanya.

- b. Bagi UMKM

Diharapkan pihak UMKM dapat menjadikan pandangan serta evaluasi mengenai penyusunan laporan keuangan serta dapat diterapkan agar pemilik UMKM dapat mengembangkan usahanya.